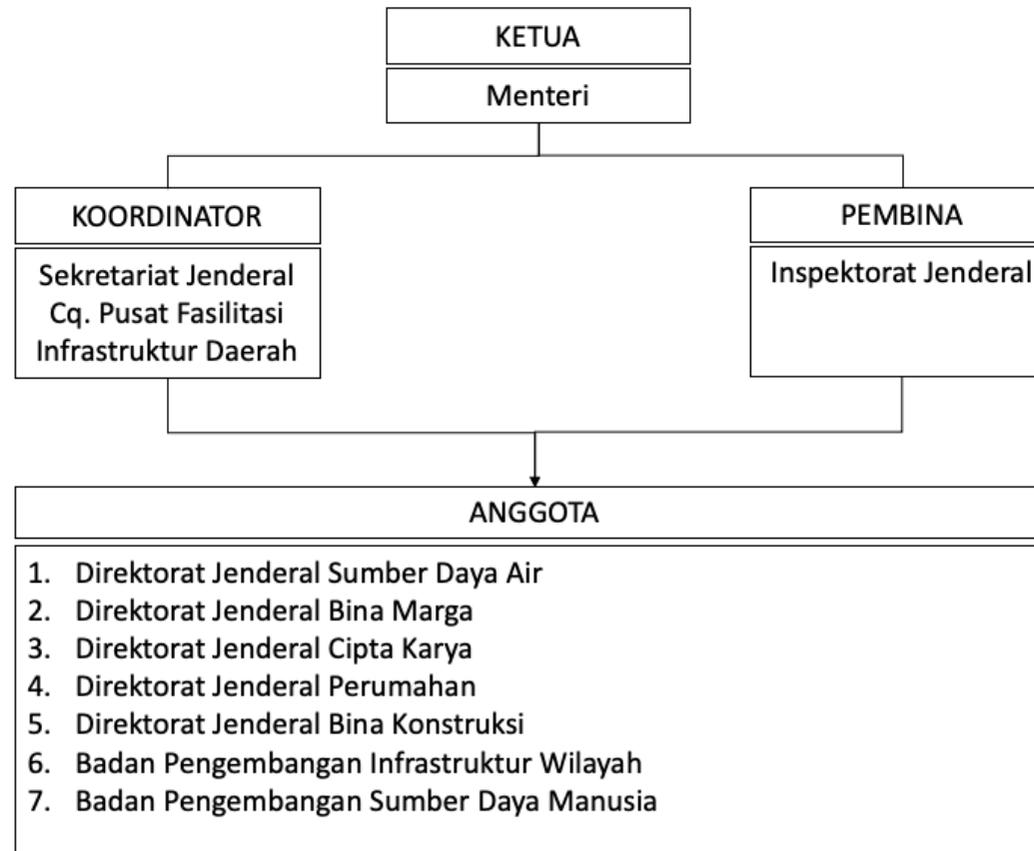
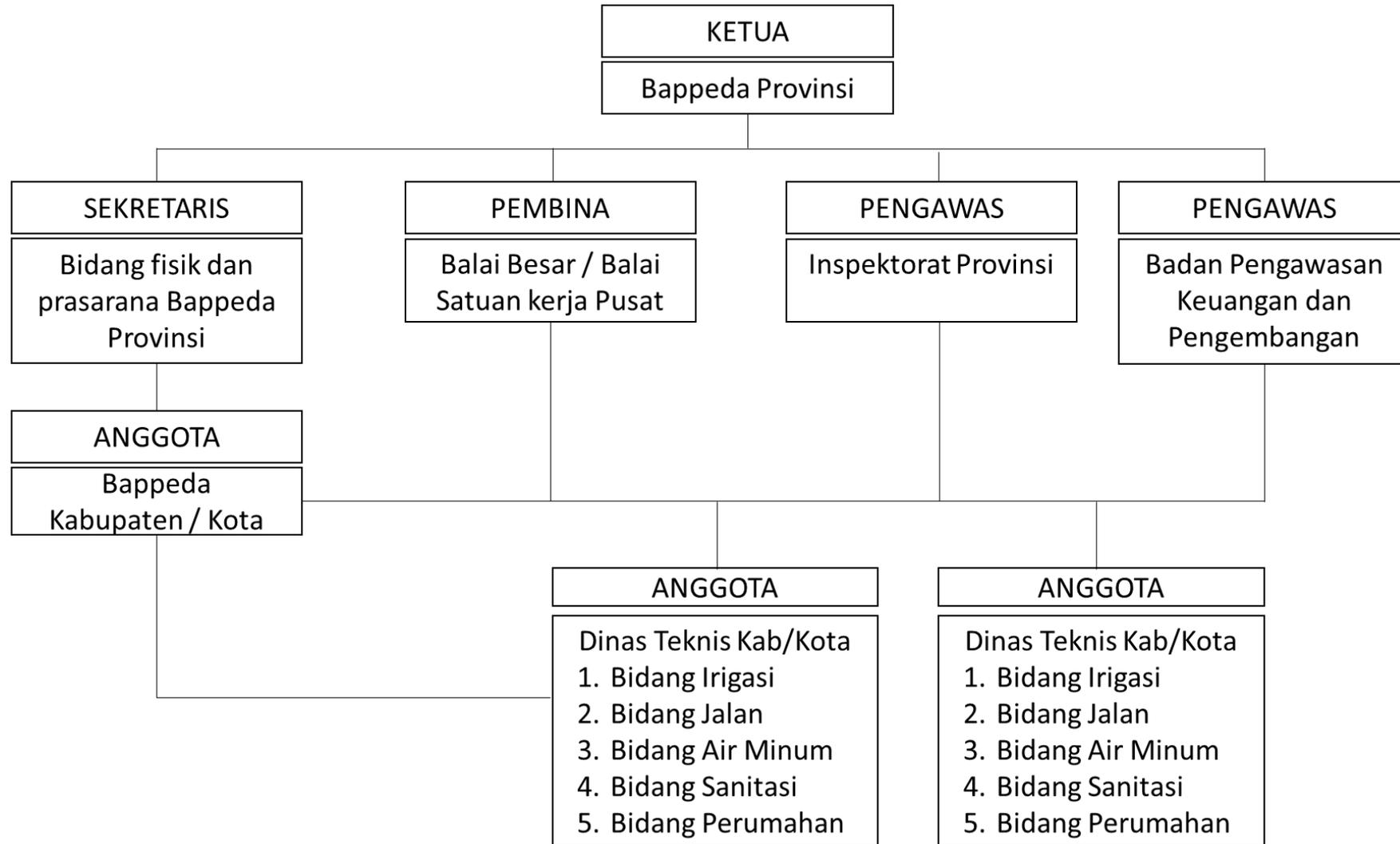


LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

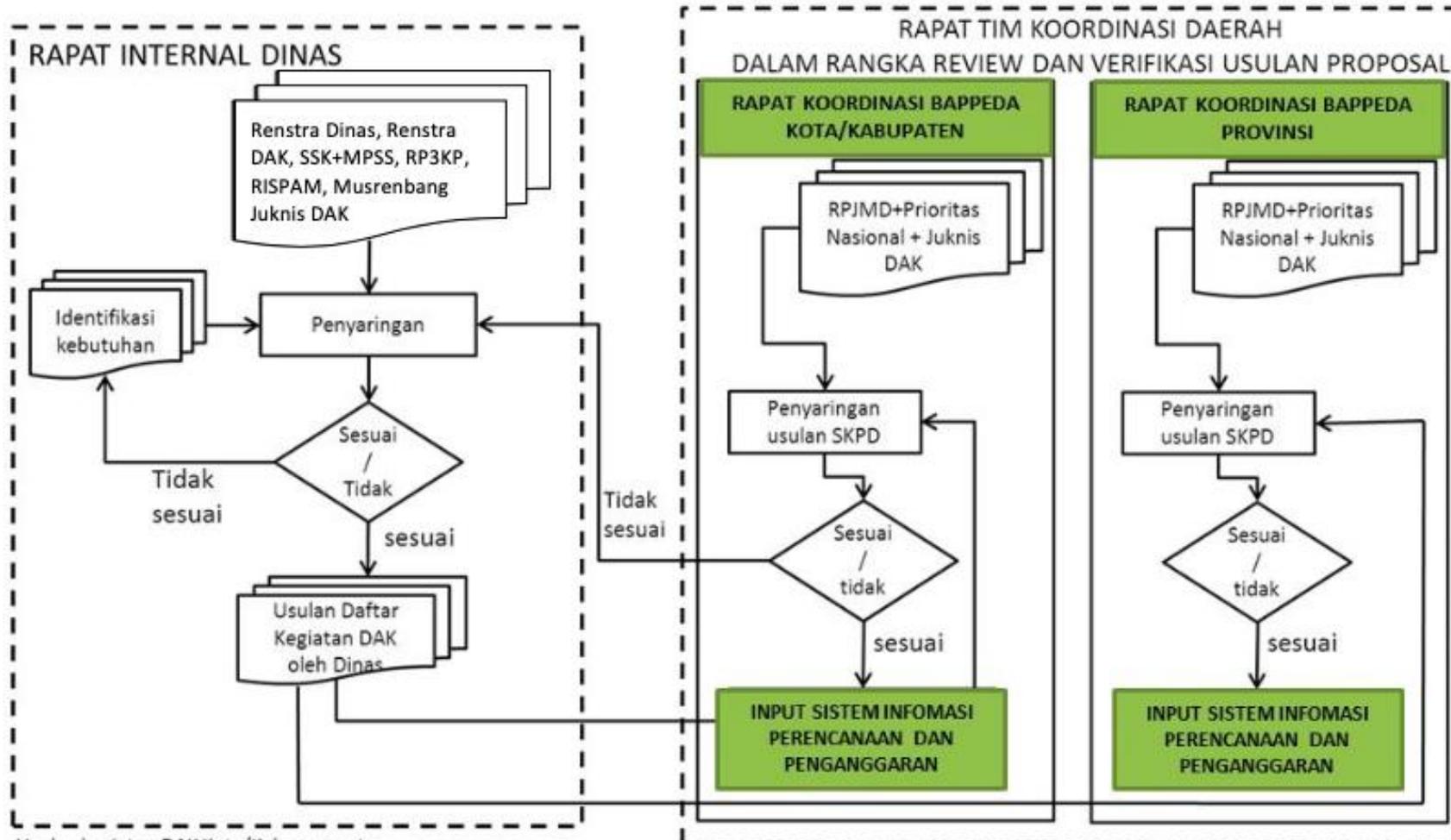
**STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI PUSAT**



**STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI DAERAH**



**TAHAP PERENCANAAN :  
PROSES PENYUSUNAN USULAN DAK INFRASTRUKTUR PUPR**

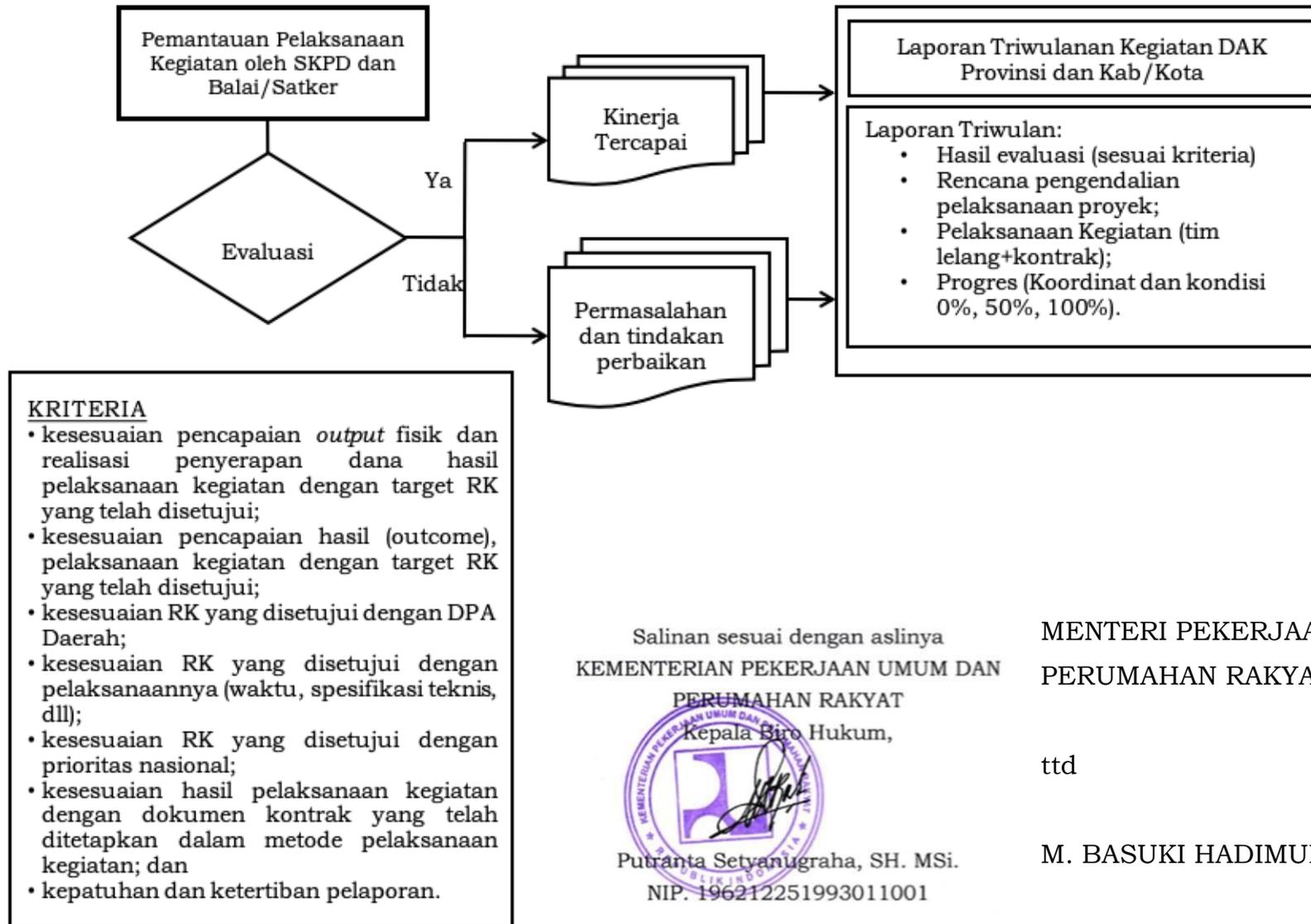


Usulan kegiatan DAK Kota/Kab memuat:

- Latar belakang usulan dan usulan prioritas utama.
- Data Teknis
- Rekap lokasi dan RAB
- Kontribusi thd target daerah (RPJMD, Prioritas Nasional,)

### TAHAP PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN

#### RAPAT TRIWULANAN TIM KOORDINASI DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO